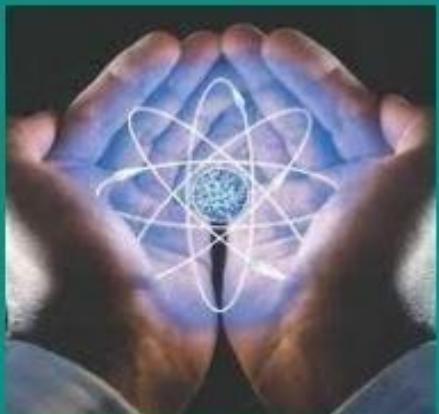


Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark).....	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Political Dynasties Undermine Democratic Governance and Constitutional Integrity in Indonesia: Dinasti Politik Melemahkan Tata Kelola Demokratis dan Integritas Konstitusional di Indonesia

Aulia Putri Insani, auliaputrivivo3@gmail.com (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Aldlyan Meilani, aldlyanmeilani6@gmail.com ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Nurul Iman, nuruliman847515@gmail.com ()

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

Political dynasties represent a systemic challenge to Indonesia's constitutional democracy by consolidating hereditary power that contradicts the principles of meritocracy, equal political access, and institutional accountability. This research aims to analyze how political dynasties distort democratic governance and weaken constitutional mechanisms that safeguard state integrity. Using a library research method supported by systematic content analysis of academic literature, legal sources, and policy documents, the study finds that dynastic politics institutionalize oligarchic power structures, suppress competitive leadership regeneration, and increase risks of corruption, collusion, and nepotism. The findings demonstrate that dynastic networks interfere with the separation of powers, politicize public resource allocation, bias representative functions toward familial interests, and reduce institutional autonomy within the constitutional framework. Although dynasties may provide policy continuity in certain contexts, these advantages are conditional and outweighed by structural threats to legal integrity and public trust. The novelty of this study lies in extending the discussion from electoral and regional governance to the broader constitutional domain, characterizing dynastic politics as a constitutional disruption rather than merely a political phenomenon. The implications suggest the need for transparent political recruitment, regulatory restrictions on hereditary candidacy, enhanced oversight mechanisms, and civic education to reinforce democratic resilience. These measures are essential to prevent the normalization of hereditary power and to protect constitutional democracy in Indonesia from long-term institutional degradation.

Highlights:

- Political dynasties weaken constitutional accountability and democratic governance.
- Hereditary power restricts leadership succession and public institutional autonomy.
- Oligarchic networks increase corruption risks and distort public representation.

Keywords: Political Dynasties; Constitutional Democracy; Democratic Governance; Meritocracy; Oligarchic Power

Published date: 2026-01-05

Pendahuluan

Dinasti politik adalah kekuasaan yang secara turun temurun dilakukan dalam kelompok keluarga dengan tujuan untuk mempertahankan atau mendapatkan kekuasaan. Keadaan politik oligarki selalu mempengaruhi dinamika politik di Indonesia. Pada kenyataannya kekuatan politik seringkali mendominasikan pada mereka yang mempunyai kekuasaan atau yang mempunyai finansial yang cukup, walaupun seperti yang kita ketahui prinsip demokrasi membuka kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berpartisipasi dalam proses politik [1]. Peristiwa ini tidak hanya memperkuat pola pikir nepotisme didalamnya, tetapi juga mencerminkan masalah struktural dalam sistem politik indonesia.

Keterkaitan keluarga atau kerabat pejabat dalam kepemimpinan daerah menyoroti kejadian politik dinasti yang semakin mengakar. Kurangnya kederisasi partai politik dan pendidikan politik yang memadai penyebab dari rendahnya etika politik. Dalam konteks ini, upaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat merupakan langkah penting dalam mengulangi fenomena dinasti politik dan memperkuat demokrasi di Indonesia [2].

Dinasti politik sangat mempengaruhi sistem ketatanegaraan, terutama dalam konteks Indonesia. Dinasti politik cenderung memperkuat jaringan kekuasaan keluarga atau kelompok tertentu, sehingga menghambat regenerasi politik dan peluang bagi kandidat baru. Ini dapat berdampak negatif pada demokrasi karna menciptakan dominasi kekuasaan yang terbatas pada kelompok tertentu dan mengurangi prinsip meritokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan [3]. Akibatnya, kualitas pemerintahan bisa menurun karena pemilihan pemimpin lebih didasarkan pada hubungan keluarga daripda kompetensi, jadi menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, praktik-praktik seperti ini membuat kepercayaan masyarakat semakin rusak terhadap lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik secara umum.

Selain itu, dengan terbatasnya regenerasi kepemimpinan yang hanta melibatkan sejumlah keluarga tertentu, peluang untuk terciptanya inovasi dan perubahan yang diperlukan pemerintahan menjadi terhambat [4]. Hal ini mengacam stabilitas dan kemajuan negara dalam jangka panjang, serta menciptakan ketidakadilan yang merugikan bagi sebagian besar masyarakat yang berharap pada pemerintah yang adil dan transparan.

Meskipun telah banyak studi yang membahas praktik dinasti politik di tingkat lokal maupun nasional, mayoritas penelitian tersebut masih berfokus pada dampaknya terhadap demokrasi elektoral, perilaku memilih, atau kualitas tata kelola daerah. Padahal, kajian mengenai bagaimana dinasti politik memengaruhi sistem ketatanegaraan secara lebih luas termasuk struktur kekuasaan, prinsip pemisahan kekuasaan, stabilitas lembaga negara, serta penguatan atau pelemahan prinsip negara hukum masih sangat terbatas dan jarang dibahas secara komprehensif. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan analisis dinasti politik tidak hanya pada ranah elektoral, tetapi pada konteks yang lebih mendasar, yakni sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menghubungkan gejala dinasti politik

dengan potensi distorsi terhadap mekanisme checks and balances, terganggunya demokrasi substantif, serta ancaman terhadap konstitusionalitas dan akuntabilitas lembaga negara [5].

Metode

Penelitian tentang “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Sistem Ketatanegaraan di Indonesia” menggunakan metode penelitian pustaka atau library research. Dalam metode ini, penulis mementingkan pada analisis terhadap data primer dan sekunder yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data primer berupa buku-buku yang secara langsung terkait dengan topik, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai jurnal, buku, media yang relevan dengan pengaruh dinasti politik terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia [6]. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena dinasti politik yang sedang berkembang dan menjadi sorot perbincangan public.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis penelusuran literature secara sistematis melalui buku, jurnal dan dokumentasi relevan. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis ini (content analysis) dan analisis konseptual. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan argument utama dalam literature, sedangkan analisis konseptual digunakan untuk membandingkan, mengklarifikasi, serta memperkuat pemahaman teoritis mengenai dinasti politik dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Sistem pemerintahan atau kekuasaan dimana kekuasaan terfokus pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekayaan, kekuatan ekonomi, atau pengaruh sosial yang signifikan atau yang sering disebut dengan “oligarki”. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang kencenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elite partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon [7]. Membahas soal pengaruh dinasti politik, memang tidak terlalu berpengaruh tetapi tetap ada rasanya kecemburuan sosial dikarenakan yang menempati posisi politik hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hubungan darah atau keluarga.

Dinasti politik ini mengacu pada konsentrasi kekuasaan politik ditangan satu keluarga atau kelompok tertentu yang meneruskan jabatan secara turun-temurun. Permasalahan dinasti politik ini condong melemahkan prinsip demokrasi, karena kekuasaan yang didapatkan lebih atas dasar hubungan keluarga daripada kompetensi dan kapasitas individu, dan menghilangkan prinsip meritokrasi. Terjadinya dinasti politik ini mengakibatkan akses kekuasaan yang harusnya terbuka luas menjadi terbatas dan ekslusif, menghambat regenerasi pemimpinan yang berkualitas dan berintegritas. Tetapi, apabila praktik dinasti politik dilakukan oleh kandidat yang memiliki potensi, maka tidak dapat sepenuhnya dikatakan merupakan perbuatan yang salah [8].

Prinsip Meritokrasi yaitu sistem pengelolaan sumber daya manusia yang memberikan penghargaan dan kekuasaan berdasarkan prestasi, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan berdasarkan kekayaan, kelas sosial atau latar belakang lainnya seperti suku, agama dan jenis kelamin [9]. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, berkualitas dan adil dimana individu yang paling kompeten mendapatkan posisi yang paling tepat.

Sistem ketatanegaraan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengedepankan prinsip negara hukum demokratis yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat melalui lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi [10].

Dalam konteks pro kontra dinasti politik, di satu sisi dinasti politik dianggap tidak bertentangan dengan demokrasi, karena dalam banyak kasus, hal itu dianggap sebagai bagian dari kebebasan politik individu untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Namun, di sisi lain, dinasti politik sering kali melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, karena dapat membatasi akses yang adil dan setara terhadap proses politik bagi warga negara. Sebenarnya dinasti politik ini sudah ada sejak lama, bahkan dapat ditelusuri hingga era kerajaan dimana kekuasaan sering kali diturunkan secara turun-temurun.

Pengaruh dinasti politik terhadap sistem ketatanegaraan sangat signifikan dan umumnya cenderung berdampak negatif. Dinasti politik dapat menghambat prinsip meritokrasi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan pemerintahan demokratis [11]. Ketika kekuasaan dan kesempatan untuk mencalonkan diri sering kali diteruskan dalam satu keluarga atau kelompok, maka kemungkinan bagi orang-orang dari luar keluarga yang mungkin memiliki kapasitas, pandangan, atau dedikasi yang tinggi dalam pelayanan publik menjadi sangat terbatas.

Hal ini merusak prinsip kesetaraan politik yang seharusnya ada dalam sistem demokrasi yang berdasarkan konstitusi, di mana seharusnya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam politik. Beberapa literatur menyebutkan bahwa adanya dinasti politik dapat mengubah demokrasi dari pemerintahan oleh rakyat menjadi "pemerintahan oleh keluarga atau kelompok" sehingga demokrasi menjadi semu, walaupun secara formal masih dalam kerangka pemilihan umum [12].

Konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga atau kelompok sangat mudah terkena masalah seperti korupsi, nepotisme, dan kolusi. Dengan adanya dominasi kekuasaan yang diwariskan serta jaringan politik, ekonomi, dan social yang sudah terbentuk, anggota dari dinasti memperoleh akses langsung ke berbagai sumber daya negara, anggaran public, izin proyek, serta pengaruh dalam birokrasi. Tanpa adanya sistem pengawasan dan kontrol yang baik, yang sering kali lemah di tempat yang dikuasai oleh dinasti, kemungkinan untuk dekat menduduki posisi penting, bukan karena keahlian mereka,. Kolusi bisa digunakan untuk mengatur proyek atau kontral public dengan cara yang tidak benar, sementara korupsi dapat berupaya

penyalahgunaan anggaran penggunaan sumber daya secara tidak benar, atau pengalokasian anggaran yang tidak sesuai. Penelitian yang ada menunjukkan bahwa keberadaan dinasti politik di banyak tempat berkaitan dengan buruknya pengelolaan pemerintahan dan meningkatnya masalah administrasi.

Terjadinya distorsi dalam fungsi representasi politik. Dalam sistem demokrasi perwakilan, pejabat publik memiliki peran untuk mengwakili suara dan kepentingan masyarakat secara luas. Namun, ketika posisi-posisi penting dalam pemerintahan terus-menerus dipegang oleh anggota keluarga yang sama, fokus representasi akan bergeser dari kepentingan rakyat menuju upaya mempertahankan pengaruh politik dari keluarga tersebut [13]. Hal ini menciptakan kondisi yang disebut bias representatif, yaitu situasi di mana kebijakan, pengalokasian anggaran, dan prioritas pembangunan lebih mencerminkan kebutuhan jaringan keluarga yang berkuasa daripada kebutuhan masyarakat yang seharusnya dilayani. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan mengurangi kualitas demokrasi yang sebenarnya karena suara kelompok masyarakat tertentu semakin tidak terdengar.

Dampak lainnya adalah menghambat regenerasi kepemimpinan dan mengurangi partisipasi politik masyarakat, sehingga sistem demokrasi menjadi stagnan dan kurang inklusif. Karena posisi politik "diturunkan", budaya pergantian pemimpin melalui proses pelatihan dan pemilihan kandidat yang profesional semakin berkurang. Kondisi ini menyebabkan elit politik tidak berkembang, sulit bagi generasi baru dengan ide-ide baru, keberanian untuk melakukan reformasi, dan pandangan yang berubah untuk masuk. Keadaan ini tidak hanya membatasi pergerakan politik, tetapi juga menghambat inovasi dalam kebijakan dan penyesuaian pemerintah terhadap tantangan baru [14]. Oleh karena itu, pemerintahan bisa kehilangan kesempatan untuk memperbarui, dan kebijakan publik cenderung terjebak mengikuti cara lama. Untuk itu, pembaruan sistem ketatanegaraan yang lebih komprehensif diperlukan, seperti pembatasan pengaruh politik dinasti melalui regulasi yang lebih ketat, masa jeda bagi anggota keluarga, penguatan pengawasan pemilihan, dan peningkatan pendidikan politik masyarakat. Semua upaya ini bertujuan memperkuat tata pemerintahan demokratis yang akuntabel dan berlandaskan good governance.

Selain itu, dinasti politik juga dapat menyebabkan fragmentasi social. Ketika satu keluarga terlalu mendominasi pemerintahan, kelompok masyarakat lain yang merasa tidak diperhatikan dapat mengalami rasa frustasi dalam berpartisipasi politik. Frustasi ini dapat berkembang menjadi ketidakpuasan yang kolektif, yang berpotensi memperkuat polarisasi social, terutama ketika kompetisi politik dianggap sebagai pertarungan antar keluarga atau antar kelompok masyarakat. Dalam beberapa konteks, fragmentasi social ini dapat menjadi sumber konflik politik dan memperlemah rasa kebersamaan dalam masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam mempertahankan stabilitas negara [15].

Keberadaan dinasti politik membentuk susunan oligarki dan hubungan patronase dalam sistem pemerintah. Kekuatan dan jaringan ini tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga mencakup aspek ekonomi dan social. Dinasti politik sering memanfaatkan kesetiaaan, jaringan perusahaan, patronase, dan hubungan keluarga untuk menjaga kekuasaan, melalui politik timbal balik, penyebaran sumber daya public

kepada pendukung atau keluarga, serta pengaturan akses ke peluang pekerjaan, proyek, dan layanan public. Dalam situasi seperti ini, pelayanan public dan distribusi sumber daya bisa dipolitikkan sesuai kepentingan dinasti, alih-alih berdasarkan kebutuhan masyarakat secara objektif. Hal ini merusak keadilan social dan legitimasi pemerintah serta menjaga kesenjangan social dan ekonomi.

Dari perspektif teori konstitusi dan pemerintahan, dinasti politik menghadirkan bahaya pengumpulan kekuasaan yang dapat merusak struktur lembaga pemerintah dan prinsi-prinsip hukum negara. Sebuah sistem pemerintahan yang baik membutuhkan pembagian kekuasaan, kemandirian institusi, pemeriksaan dan penyeimbangan, serta akses masyarakat terhadap mekanisme pengawasan [16]. Namun, saat kekuasaan terpusat pada satu keluarga politik, lembaga-lembaga negara bisa diambil alih, sehingga kemandirian, profesionalisme, dan netralitas institusi dapat terganggu. Sebagai akibatnya, sistem konstitusi bisa berubah menjadi oligarki, patrimonialisme, atau bahkan personalisme, yang sangat jauh dari tujuan demokrasi modern yang berlandaskan pada hukum.

Selanjutnya, dari sudut pandang kebijakan public dan pembangunan, keberadaan dinasti politik dapat berdampak negative terhadap kualitas kebijakan dan layanan public, serta memperlambat kemajuan social ekonomi. Hal ini terjadi karena keputusan sering kali dipengaruhi oleh faktor keluarga, jaringan, atau kepentingan politik jangka pendek, sehingga penempatan anggaran dan proyek pembangunan mungkin tidak disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, melainkan lebih kepada kepentingan dinasti tersebut. Berbagai penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara dominasi dinasti politik dengan hasil pembangunan yang buruk, ketidakefisienan dalam penempatan anggaran, serta rendahnya mutu layanan public, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain.

Dalam jangka waktu yang panjang, pemerintahan yang dikuasai oleh keluarga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Ketidakadilan dalam akses, praktik favoritisme, penguasaan oleh sekelompok kecil orang, dan cara-cara politik yang tidak trasnparan dapat menciptakan rasa kecewa, merasa terasing, dan apatis di kalangan keluarga. Pandangan bahwa politik "hanya untuk beberapa keluarga" dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan, mengurangi jumlah orang yang memberikan suara, dan menghambat harapan masyarakat untuk terlibat dalam politik. Dalam sistem hukum yang menjadikan kekuasaan berasal dari rakyat, kondisi ini menunjukkan bahwa politik kehilangan dasar moral dan hukum yang seharusnya dimiliki, membuat demokrasi tidak nyata, dan mengabaikan hak warga untuk berpartisipasi dalam politik serta mendapatkan perwakilan yang adil [17].

Salah satu dampak negative yang juga signifikan adalah meningkatnya biaya politik. Keluarga yang berada dalam dinasti politik memerlukan berbagai sumber daya yang besar untuk mempertahankan kekuasaanya, seperti memperkuat jaringan koneksi, melakukan kampanye secara berulang, serta memberikan biaya untuk mempertahankan loyalitas para pendukung. Biaya politik yang semakin tinggi ini biasanya ditanggung melalui akses terhadap sumber daya milik negara. Ketika anggaran publik digunakan untuk mempertahankan dominasi keluarga, maka berisiko terjadi penurunan efisiensi penggunaan dana

serta masalah keberlanjutan keuangan negara. Pada saat tertentu, kondisi ini dapat mengurangi kualitas pengelolaan keuangan negara dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dinasti politik bisa memberikan stabilitas atau kesinambungan dalam pemerintahan, kenyataan yang ada dan pandangan normatif menunjukkan bahwa kekuasaan dinasti membawa banyak risiko struktural bagi sistem pemerintahan. Dengan demikian, dari sudut pandang hukum tata negara dan demokrasi yang berkonstitusi, keberadaan dinasti politik seharusnya dilihat bukan sebagai hal biasa dalam politik, melainkan sebagai ancaman serius bagi keabsahan, mutu pemerintahan, dan keadilan dalam politik.

Praktik dinasti politik meskipun sering menjadi sasaran kritik, ketika dilihat dalam konteks lembaga yang cukup stabil dan struktur partai serta pemerintahan yang berjalan dengan baik, dapat memberikan kontribusi nyata untuk keberlanjutan, kestabilan, dan efisiensi pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan seperti yang ada di Indonesia, yang merupakan negara kesatuan dengan sistem presiden, demokrasi berdasarkan konstitusi, serta kebutuhan akan pemerintahan yang efektif di berbagai tingkat, kemungkinan positif dari dinasti politik tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam situasi tertentu, dinasti politik dapat membantu menjaga kestabilan pemerintahan dan kelangsungan kebijakan. Dari sudut pandang kelangsungan kepemimpinan dan kesinambungan kebijakan [18]. Dalam sistem birokrasi yang sering kali berganti pemimpin, terutama di tingkat daerah, sering kali kebijakan terganggu, prioritas pembangunan berubah, atau bahkan proyek dibatalkan saat kepala daerah berganti.

Dalam konteks dinasti politik, ketika proses penggantian kepemimpinan tetap dalam satu keluarga atau kelompok teradapt kemungkinan penerus memiliki pandangan kebijakan yang sama dengan pendahulunya, baik dalam program pembangunan, visi jangka panjang, maupun hubungan dengan birokrasi/politik. Ini memberi kesempatan untuk menciptakan kesinambungan dalam kebijakan pembangunan, pelaksanaan proyek infrastruktur, dan program sosial yang memerlukan waktu lebih lama agar mendapatkan hasil yang nyata.

Selain itu, terdapat sebuah pendapat yang menyatakan bahwa anggota dinasti politik, karena dibesarkan dalam lingkungan politik dan dalam keluarga yang memiliki tanggung jawab publik, kemungkinan memiliki pengalaman dalam bidang politik, pengetahuan tentang administrasi, dan hubungan sosial atau politik yang sudah mumpuni. Jika situasinya ideal, hal ini dapat menghasilkan pejabat publik yang lebih siap, memahami cara kerja birokrasi dan prosedur pemerintahan, serta mampu memanfaatkan jaringan politik untuk mendukung pelaksanaan program-program. Seperti yang terlihat dalam pembahasan literatur, keberadaan modal keluarga, baik sosial maupun jaringan, dapat meningkatkan kemampuan untuk berfungsi dalam pemerintahan.

Jika dilihat dari sudut pandang sistem pemerintahan di negara demokrasi, terutama di negara yang memiliki kelemahan dalam institusi, perpecahan politik, atau kurangnya tradisi demokrasi, adanya dinasti politik sering kali dilihat sebagai cara untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan politik yang ada.

Keluarga atau kelompok bisa menjadi satu kesatuan kekuasaan yang dikenal oleh pemilih, yang menyebabkan adanya stabilitas politik secara sementara dan menghindari konflik antara para elit. Struktur hubungan antar keluarga ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antara elit yang berbeda, karena kekuasaan tetap berada dalam satu jaringan yang sama [19]. Dalam penilaian terhadap sistem pemerintahan yang rentan terhadap perpecahan, hal ini dapat dianggap sebagai mekanisme penyesuaian agar pemerintahan tetap stabil dan fungsi negara tidak mudah terganggu.

Dalam beberapa contoh nyata, terutama di wilayah yang memiliki tradisi politik yang kuat dan budaya social yang berkakar pada komunitas atau keluarga, dinasti politik bisa mencerminkan cara khas dalam mewakili daerah. Di sini, pemimpin dan wakil pemimpin daerah sering kali dikenal lewat hubungan social dan nama baik keluarga. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung merasa lebih akrab dan mempercayai pemimpin dari keluarga yang telah dikenal sebelumnya, sehingga legitimasi, baik dari sisi politik maupun budaya, menjadi tokoh dan partisipasi politik bisa lebih terjaga.

Dengan begitu, dinasti politik sering dianggap oleh masyarakat sebagai perwakilan “keluarga yang peduli pada daerahnya” yang memudahkan dalam penggerakan sosial, konsultasi lokal, dan pelaksanaan program berbasis komunitas, terutama di ranah pemerintahan daerah. Penelitian yang membahas dinamika budaya politik di Indonesia menunjukkan bahwa dinasti politik tidak hanya menyangkut kekuasaan, tetapi juga bagaimana jaringan keluarga atau klan berperan dalam mewakili daerah dan menjaga stabilitas komunitas. Dapat dikatakan bahwa di banyak daerah di Indonesia, di mana struktur partai politik, cara memilih pemimpin, dan budaya politik memiliki keterbatasan, dinasti politik bisa menjadi cara yang praktis untuk menjalankan pemerintahan. Saat partai politik tidak bisa memilih anggota dari masyarakat secara luas atau gagal membuat mekanisme pemilihan anggota yang baik, maka orang-orang dari keluarga atau kelompok yang sudah dikenal di dunia politik bisa memastikan bahwa jabatan publik tetap terisi, sehingga secara administratif dan institusional pemerintahan tidak terhenti atau kosong. Jadi, dinasti politik kadang dilihat sebagai solusi praktis untuk menjaga kelangsungan pemerintahan, terutama di tingkat pemerintahan lokal.

Literatur akademik yang membahas secara spesifik keuntungan dinasti politik sangat terbatas dan terkadang sulit ditemukan dengan data empiris kuat, sebagian besar penelitian justru menyoroti dampak negatif. Argumen-argumen yang telah disebutkan di atas bersifat bersyarat dan mengandung “jika” yang besar, yaitu, jika anggota dinasti memang memiliki kemampuan, integritas, dan bisa membedakan antara kepentingan publik dengan kepentingan keluarga; jika terdapat sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik; serta jika masyarakat dan budaya politik mengizinkan keterlibatan keluarga atau klan tanpa langsung membatasi kesempatan bagi pihak luar [20].

Dalam dinasti seperti itu, dinasti politik dapat memberikan manfaat bagi stabilitas institusi keberlanjutan kebijakan dan representasi daerah, yang merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan terutama di negara-negara demokrasi yang masih baru atau dengan lembaga yang lemah.

Oleh karena itu, dalam konteks akademis Hukum Tata Negara dan demokrasi konstitusional memahami dinasti politik tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai fenomena social politik yang rumit, yang dalam keadaan tertentu bisa membawa stabilitas bagi lembaga, keberlanjutan kebijakan, dan representasi local.

Secara keseluruhan, dinasti politik memperlihatkan adanya dua sisi yang saling bertolak belakang; di satu sisi berpotensi menjaga kesinambungan kebijakan, stabilitas politik, serta representasi local; namun di sisi lain juga berisiko menurunkan kualitas demokrasi melalui penyepitan akses politik, potensi bias kepentingan keluarga, dan melemahnya prinsip meritokrasi. Pemahaman terhadap dua isis tersebut penting sebagai pijakan sebelum merumuskan rekomendasi normative yang bertujuan memperkuat demokrasi, menegaskan akuntabilitas, serta memastikan bahwa keberlanjutan pemerintahan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Simpulan

Dinasti politik muncul sebagai akibat dari dominasi elite dalam proses pencalonan politik, sehingga mekanisme kompetisi tidak berjalan secara demokratis dan meritokratis. Konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga melemahkan kualitas demokrasi karena jabatan publik cenderung ditentukan oleh hubungan kekerabatan, bukan kompetensi. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, praktik dinasti politik tidak secara langsung melanggar hak politik warga negara, tetapi berdampak pada ketidaksetaraan akses politik, melemahkan regenerasi kepemimpinan, dan meningkatkan potensi korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dinasti politik juga memengaruhi efektivitas kebijakan public, memicu fragmentasi social serta berpotensi mengganggu prinsip negara hukum dan idenpendensi lembaga negara.

Secara keseluruhan, literature menunjukkan bahwa dampak negative dinasti politik lebih dominan dibandingkan manfaat yang mungkin ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki system politik dan ketatanegaraan, seperti penguatan mekanisme rekrutmen politik yang transparan dan terbuka, pembatasan praktik politik kekerabatan melalui regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas lembaga pengawas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta pendidikan politik yang mendorong partisipasi public secara lebih luas. Implementasi langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko dinasti politik dan memperkuat kualitas demokrasi serta tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta masukan ilmiah yang sangat berarti dalam proses penyusunan artikel ini. Apresiasi yang tulus juga diberikan kepada rekan sejawat yang telah memberikan dukungan, diskusi, dan kerja sama selama penelitian berlangsung. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kajian mengenai pengaruh dinasti politik terhadap sistem ketatanegaraan di Indonesia, serta menjadi referensi bagi

pihak yang berkepentingan dalam memahami dinamika demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Referensi

- [1] T. Abufatih, A. Maskur, and S. Alba, “Dismantling political dynasties: Transformation of Pancasila democracy in the context of family power,” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, vol. 9, no. 1, pp. 45–62, 2024.
- [2] A. I. Ananda, “The influence of political dynasty on the democracy climate,” *Constitutional Law Society Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 12–25, 2023.
- [3] N. P. I. Armitha Pratiwi and I. M. M. Widyanara, “The phenomenon of political dynasties in regional head elections and their impact on democracy in Indonesia,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 10, no. 1, pp. 55–70, 2025.
- [4] E. Aspinall and W. Berenschot, *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2020.
- [5] N. Choi, “Local political dynasties in Indonesia: Strengthening power through patronage and informal networks,” *Asian Journal of Political Science*, vol. 29, no. 3, pp. 214–232, 2021.
- [6] N. Darmawan, “Dinasti politik dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia,” *Jurnal Politik*, vol. 8, no. 2, pp. 130–147, 2022.
- [7] F. Dona, “Dinasti politik di era otonomi daerah dalam perspektif demokrasi,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, vol. 7, 2022.
- [8] E. Fitriyah and D. Rahmawati, “Political dynasties and the erosion of meritocracy in Indonesia’s regional governance,” *Journal of Government and Politics*, vol. 14, no. 1, pp. 88–102, 2023.
- [9] K. Gadaffi and S. Nelwati, “Dampak dinasti politik terhadap culture demokrasi Pancasila di Indonesia,” [Nama Jurnal Tidak Tercantum], vol. 2, no. 3, 2024.
- [10] V. R. Hadiz, “Resisting Indonesia’s oligarchy,” *Journal of Contemporary Asia*, vol. 47, no. 1, pp. 68–82, 2017.
- [11] N. Hikmawati, “Dampak politik dinasti terhadap akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nusantara*, vol. 16, no. 2, pp. 101–115, 2023.
- [12] D. Larasati and F. Rezki, “Political dynasties and local government spending in Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 25, no. 1, pp. 55–70, 2024.
- [13] S. T. Maulia, “Politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia,” *Journal of Practice Learning and Educational Development*, vol. 4, no. 2, pp. 118–125, 2024.
- [14] I. Puansah, O. Sukmana, and V. S. D. Soedarwo, “Political dynasties in village government and their impact on society and development,” [Nama Jurnal Tidak Tercantum], vol. 5, no. 2, pp. 119–136, 2024.

- [15] A. A. Rahma, A. A. Oktaviani, A. Hofifah, T. Z. Ahda, and R. G. Nugraha, “Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 1, pp. 2260–2269, 2022.
- [16] A. Rasyid, “Dinasti politik dan degradasi prinsip representasi dalam pemilihan kepala daerah,” *Jurnal Demokrasi & Politik Lokal*, vol. 5, no. 1, pp. 33–48, 2022.
- [17] T. Seran and H. Risyah, “Politik dinasti dalam perspektif administrasi menjelang Pemilu 2024,” *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, vol. 6, no. 2, pp. 77–92, 2024.
- [18] R. Setiawan, “Political dynasty and governance quality: Evidence from local politics in Indonesia,” *Public Administration Journal*, vol. 12, no. 3, pp. 144–159, 2021.
- [19] L. Suryani, “Patronage, nepotism, and political dynasties in contemporary Indonesia,” *Jurnal Sosiologi Politik*, vol. 9, no. 1, pp. 50–67, 2023.
- [20] R. A. Dwianto, A. B. Darmawan, and Salahudin, “Meta-Analysis as a Research Tool: A Systematic Review of Bibliometric Studies in Political Dynasty,” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 2023.